

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz, Nurrahmi, (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan, Hutan Atau Perkebunan* (Hawa dan Ahwa, Pakanbaru)
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Asep Mulyana, (2023), *Piercing The Corporate Veil Dinamika Regulasi Dan Praktik Pengadilan*, (Rajawali pers: Depok)
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Butar-Butar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2014)., *Business Research Methods* (Twelfth Ed). New York: McGraw-Hill International Edition.
- Creswell, J.W., & J. David Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Diantha, I.M.P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Faishal, A. (2016). *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Pustaka Yustisi, Yogyakarta.
- Gary, Scanlan, Ray, C. (1985). *An Introduction to Criminal Law*. London: Blacstone Press Limited.
- Mantili, R., & Afriana, A. (2015). *Hukum Acara Perdata*. CV Kalam Media, Bandung
- Mathew B. Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Soorcebook*. Edition 3. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Mertokusumo, S. (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta .
- Oce Madril, Agung Nugroho, Eka Nanda Ravizki, (2020), *Menjerat Korupsi Korporasi: Analisis Regulasi dan Studi Kasus*. Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Santoso, A.P.G., Ahmad Rifai, A., Wijayanti, E., & Prastanti, R.A. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pusataka Baru Press. Yogyakarta
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Buidling Approach* (Seventh Edition). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Rajawali Press. Jakarta.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi* Penerbit Alfabeta: Bandung
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Setara Press : Malang.

B. Jurnal, Disertasi, dan Tesis

- Adrian, F., & Sabri, F. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *DELICTI: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 27-41.
- Ambarwati, D.L. (2021). Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana. Dapat diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>.
- Ardison Asri, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 1(1), 118-127.
- Bimantara, B., & Somawijaya, & Immulhadi. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 366-381.
- Djatkiko, A.A., Sanjaya, R., Hidayati, R.K. (2022). Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Ketentuan Hukium Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(8), 1-11.

- Eli Lederman, Models for Impsing Corporate Criminal Liability: From Adaption and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity, Buffalo Criminal Law Review, (Vol 4: 641),
- Fira Saputri Yanuari, Mengenal Lebih Dekat Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi, Mei 5 2021, di access dari : <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi>
- Harahap, E.S. (2016). Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Departemen Hukum Pidana*, 2016.
- Hayrani, M.DS, (2018). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (4), 331-342.
- Karokaro, A.S. (2018). Walhi: Kondisi Indonesia masih darurat ekologis. 24 April 2018. Dapat diunduh pada <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>
- Luthan, S. (2009). Asas dan kriteria kriminalisasi. *Jurnal Hukum*, 10(1), 1-17.
- Martha, I., Dewa Agung Gede Mahardika, D.A.G., & Suartha, I.D.M. (2018) "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 1(1).
- Pavitasari, K.K., Najicha, F.U. (2022). Pertanggungjawaban pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 dalam mengolah limbah B3. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 78-92.
- Ramdani, M.F., & Herniarti, D.D. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap PT Grand Perintis Industry atas Pembuangan Limbah Ilegal di Kota Bandung. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(2), 993-997.
- Santosa, A.A.G.D.H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 336-344.
- Satmaidi, E. (2011). "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, 4(1), Fakultas Hukum Universitas Riau, 69-81.
- Sutrisno. (2011). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 3(3), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Tarigan, J.C. (2021). "Penerapan Asas Ulimum Remedium terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Merdan.

- Utomo, G.S. (2019). Fungsionalisasi hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di daerah aliran sungai Citarum dihubungkan dengan asas keadilan. *Aktualita*, 2(2), 2019, 422-437.
- Wati, U.R. (2023). Ekistensi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata. Tesis pada Universitas Islam Indonesia, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum.
- Wijaya, H., Santoso, B., Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206-220.
- Black's Law Dictionar. (2004) Eight Edition, (United States of America: West)

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 3699.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
- Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453.

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39.

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598.

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Alkes Mengandung Merkuri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267.

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268.

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294.

D. Wawancara Pribadi:

1. Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc.

- * Jabatan: Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- * Tanggal Wawancara: 25 April 2024 dan 06 Mei 2024
- * Tempat Wawancara: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia

2. DR. Laode M Syarif, SH., LLM.

- * Jabatan: Praktisi Hukum, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015 – 2019.
- * Tanggal wawancara: 30 Mei 2024
- * Tempat wawancara: Artotel Hotel Jakarta